

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan sekaligus pedoman peneliti. Berikut hasil-hasil penelitian terdahulu yang dijadikan perbandingan sekaligus pedoman, tidak terlepas dari tema penelitian yaitu tentang implementasi kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir:

1. Feny Irfany Muhammad, Yaya M Abdul Aziz. (2020). “Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir Di Desa Dayeuhkolot”.
<https://journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2235/1117>

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan survey. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan Dalam Mitigasi Bencana Banjir oleh BPBD Desa Dayeuhkolot Kabupaten Bandung belum berjalan optimal, masih terdapat beberapa permasalahan seperti kurangnya pencegahan banjir, penanganan darurat bencana banjir, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terletak pada teori yang digunakan dan lokus pada penelitian serta pada peraturan daerah yang berlaku.

2. Hendrik Kristian Rumaseuw, (2022) “Implementasi Kebijakan Mitigasi Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bagi Masyarakat Terdampak Banjir Di Kabupaten Supiori Provinsi Papua” <http://eprints.ipdn.ac.id/11372/>

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan mitigasi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Supiori Provinsi Papua belum berjalan efektif dikarenakan masih banyaknya permasalahan yang terjadi, misalnya masih minimnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan mitigasi bencana daerahnya sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan

pendekatan induktif serta analisis data menggunakan teori Van Metter dan Van Horn

Perbedaan dengan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada lokus penelitian dan peraturan daerah yang berlaku.

3. Anita Dwi, Tri Yulianti, Adi Susiantoro. (2022) “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Pada Tahap Tanggap Darurat Di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo”.
<https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/snhs/article/download/1045/509/1766>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward, Edward III. Hasil penelitian menyimpulkan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat realisasinya masih terdapat hambatan dikarenakan kurangnya ketersediaan anggaran serta sumber daya manusia yang belum mumpuni pada tahap tanggap darurat, masih kurangnya fasilitas saat bencana seperti kurangnya pompa air, pelampung, dsb. Yang menyebabkan proses penanggulangan bencana saat bencana mengalami kendala/terhambat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari penggunaan teori dan lokus penelitian serta peraturan daerah yang berlaku.

4. Muhammad Ali Yusup, Hanny Purnamasari, Kariena Febriantini. (2022) ” Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir Di Kota Bekasi”.
<https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/3608/2957>

Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teori Edward III. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan cenderung lambat sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat yang terdampak bencana banjir merasakan kekecewaan yang cukup mendalam. Kemudian kurang tanggapnya Pemerintah Kota Bekasi yang menyebabkan banyaknya titik banjir serta normalisasi sungai yang belum optimal.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti yaitu dari penggunaan teori dan lokus penelitian serta peraturan daerah yang berlaku.

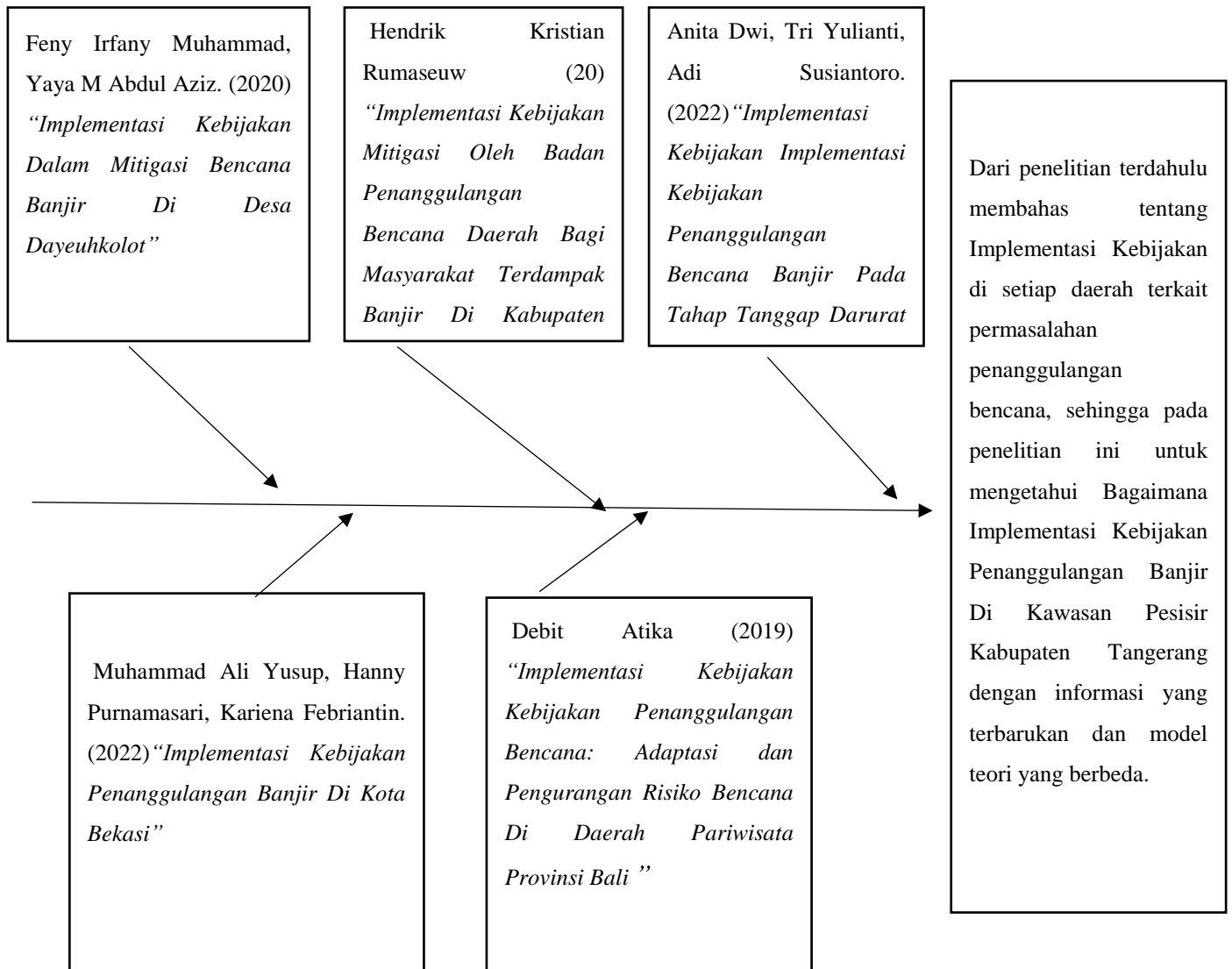
5. Debit Atika (2019) “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana: Adaptasi dan Pengurangan Risiko Bencana Di Daerah Pariwisata Provinsi Bali”. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/170190/>

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu menggambarkan fakta-fakta, keadaan dan fenomena sesuai realita di lapangan. Data-data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan Teknik Analisa seperti yang dikemukakan oleh Miles Huberman dan Saldana (2014). Proses implementasi dari penelitian ini dijawab oleh teori model implementasi dari Grindle.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Provinsi Bali telah memenuhi amanat undang-undang penanggulangan bencana untuk melakukan pekerjaan penanggulangan bencana, namun kebijakan penanggulangan bencana tersebut belum efektif. Sejumlah isu menjadi penyebab buruknya implementasi upaya mitigasi bencana di Bali. Masalah pertama adalah belum adanya peraturan daerah yang mengatur urusan penanggulangan bencana. Kedua, pemerintah provinsi hanya fokus pada promosi dan pengembangan pariwisata, serta kurang menitikberatkan pada pengurangan risiko bencana. Ketiga, kurangnya sinergi antara OPD dan pemangku kepentingan lainnya, dan Provinsi Bali belum meningkatkan kapasitas daerah dalam menerapkan pengurangan risiko bencana.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti terletak pada teori yang digunakan dan lokus pada penelitian, pada peraturan daerah yang berlaku serta objek penelitian yang berbeda. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sama-sama membahas penanggulangan bencana.

Gambar 2.1 Diagram Fishbone



Sumber: Hasil Olahan Peneliti

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Konsep Kebijakan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai sebuah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan untuk mewujudkan capaian yang telah disepakati. Kebijakan secara umum yaitu rumusan keputusan yang diambil oleh pemerintah yang menjadi pegangan dalam mengatasi permasalahan yang ada serta menjadi acuan program yang akan dilaksanakan. Beberapa ahli menjelaskan teori-teori mengenai kebijakan publik:

Menurut Thomas R. Dye dikutip oleh (Anggara 2018) *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do”*. Artinya Pemerintah dapat memilih dalam menentukan tindakan, sebab kebijakan publik memiliki tujuan.

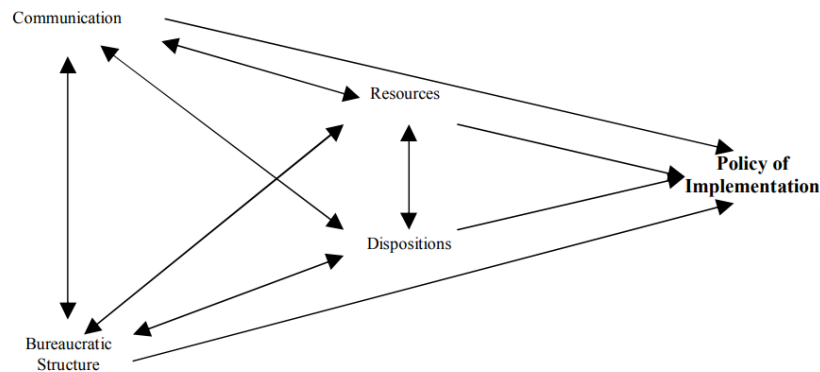
Menurut B. Guy Peters dalam (Suaib et al. 2022) kebijakan publik adalah sebuah kumpulan atau pedoman kegiatan pemerintah, yang dilakukan secara langsung ataupun melalui agen milik pemerintah yang dapat mempengaruhi kehidupan warga negara.

Menurut Keban yang dikemukakan oleh (Kadji 2015) menjelaskan bahwa: “Public Policy dapat dilihat sebagai konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya; dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Secara sederhana kebijakan publik dapat dikatakan sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju kepada masyarakat yang dicita-citakan.

2.2.2. Dimensi Implementasi Kebijakan

1. Model Edward III (Kadji 2015)



Gambar 2.2 Model Implementasi Kebijakan Edward III

Sumber: (Kadji 2015)

Model Edward III (1980) mengemukakan “*In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask: What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?*”. Kemudian teori ini menawarkan serta menimbang empat factor yang ada dalam pelaksanaan kebijakan yakni:

1) Komunikasi (*communication*)

Agar berjalannya proses kebijakan, pemerintah harus menyampaikan kebijakan secara jelas, konkret, serta konsisten kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan. Apabila tidak dijalankan maka kesalahpahaman kemungkinan besar akan terjadi

2) Sumber Daya (*resources*)

Sumber daya menjadi penting karena berisi staf sesuai dengan bidangnya. Dalam proses implementasi kebijakan sumber daya tidak hanya soal kuantitasnya tetapi sumber daya yang mendukung kapasitas serta motivasi dalam kebijakan tersebut.

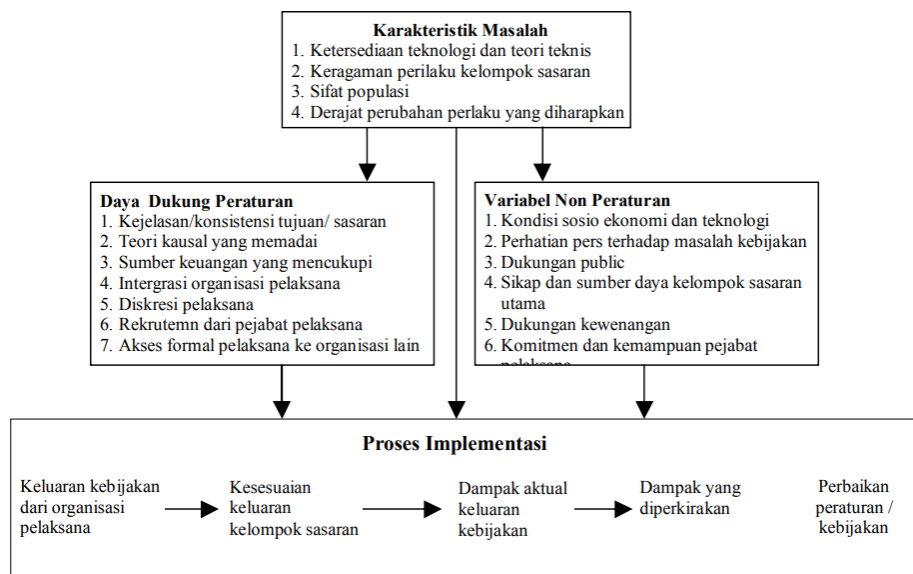
3) Sikap Pelaksana (*Disposition*)

Sikap pelaksana juga termasuk factor penting dalam jalannya proses pelaksanaan kebijakan. Maka yang diharapkan dari implementor bukan hanya mengetahui tugas atau fungsinya saja tetapi kapabilitas juga harus dimiliki.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Ketika sumber daya telah mencukupi tetapi pada tahap pelaksanaan kebijakan sering terhambat akibat tidak efisien nya struktur birokrasi. Hal ini menyebabkan langkanya sumber daya, penggiringan opini terkait kebijakan yang ada, serta terlupanya fungsi dari kebijakan itu sendiri.

2. Model Mazmanian dan Sabatier (Kadji 2015)



Gambar 2.3 Model Implementasi Mazmanian dan Sabatier

Sumber: (Kadji 2015)

Model yang kedua adalah model menurut Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikemukakan oleh (Kadji 2015) menjelaskan implementasi sebagai usaha untuk menjalankan putusan kebijakan. Kemudian model ini membagi beberapa variabel yang dirasa dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan, antara lain:

1) Variabel independent

Maksud dari variabel ini adalah mudah tidaknya masalah dapat di control terkait indikator permasalahan teori dan implementasi, keragaman perilaku kelompok sasaran, serta jumlah kelompok sasaran sebanding dengan presentase penduduk dan perubahan ruang lingkup perilaku yang dikehendaki.

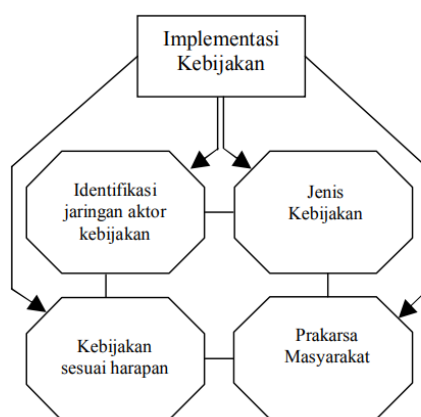
2) Variabel intervening

Variabel kemampuan kebijakan publik, adanya dukungan sikap dan sumber daya dari masyarakat, lebih perhatiannya pejabat, serta memiliki pejabat pelaksana yang komitmen dan berkualitas dalam memimpin.

3) Variabel dependen

Variabel ini dimaksud dengan proses implementasi yang terdiri dari lima tahapan mulai dari 1) pemahaman tentang Lembaga/badan pelaksana dalam bentuk struktur kebijakan pelaksana, 2) kepatuhan objek, 3) fakta, 4) penerimaan fakta, dan 5) berakhir dengan proses revisi atas kebijakan yang dibuat dan di implementasikan secara menyeluruh dan bersifat mendasar.

3. Model Elmore, Lipsky, Hjem, dan O'Potter (Kadji 2015)

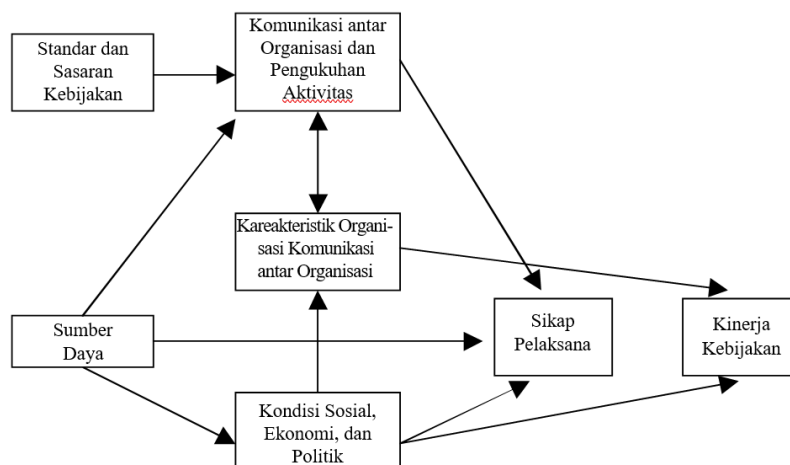


Gambar 2.4 Model Implementasi Elmore, Lipsky, Hjem, dan O'Potter

Sumber: (Kadji 2015)

Model ketiga ini menegaskan bahwa “model ini sebagai proses dari mengidentifikasi jaringan actor yang terlibat didalam proses pelayanan dengan menanyakan tujuan, strategi, aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka milik”. Model ini memiliki beberapa proses tahapan, yaitu Pertama, mengklasifikasikan jaringan pelaksana yang terlibat, Kedua jenis kebijakan guna mendorong masyarakat untuk menjalankan kebijakan dengan bantuan pemerintah di level terbawah, Ketiga kebijakan dirancang sesuai kebutuhan public dan Keempat langsung kepada masyarakat atau kepada LSM terkait.

4. Model Van Metter Van Horn (Kadji 2015)



Gambar 2.5 Model Van Metter Van Horn

Sumber: (Kadji 2015)

Model Van Metter dan Van Horn sebagaimana dikutip oleh (Kadji 2015) menjelaskan bahwa model ini adalah sebuah model yang mengandaikan pelaksanaan kebijakan berjalan lurus sesuai kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja kebijakan public. Ada beberapa indikator yang mempengaruhi kebijakan publik itu sendiri yaitu:

1) Standar dan sasaran kebijakan

Setiap kebijakan harus mempunyai standar dan suatu kebijakan jelas dan terstruktur dengan ketentuan yang telah ditetapkan dapat terwujud.

2) Sumber daya

Indikator dari berhasilnya proses implementasi kebijakan tergantung dari kemampuan sumber daya yang digunakan. Manusia adalah faktor sumber daya terpenting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi. Ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber daya itu minim, maka kinerja kebijakan public agak sulit diharapkan secara optimal.

3) Komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan standar mekanisme dalam implementasi kebijakan publik. Semakin optimal koordinasi dan komunikasi yang dilakukan antar stakeholder, maka semakin kecil resiko kesalahan/konflik yang ditimbulkan dan begitu sebaliknya.

4) Karakteristik dari agen pelaksana/implementor

Penting untuk memperhatikan aktor eksekutif, baik organisasi formal maupun informal yang akan berpartisipasi dalam implementasi kebijakan publik, karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat dipengaruhi oleh gaya aktor eksekutif.

5) Kecenderungan dari pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana sangatlah mempengaruhi faktor berhasil atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Tetapi kebijakan yang dilakukan oleh agen pelaksana terlahir dari sistem top-down yang bersifat general.

6) Keadaan ekonomi, sosial, dan politik

Pada indikator ini perlu sangat diperhatikan untuk menilai keberhasilan kinerja implementasi kebijakan publik melalui penilaian kondisi keadaan ekonomi, sosial, dan politik. Indikator ini tidak akan berjalan kondusif akan berpengaruh dan menjadi potensi kegagalan implementasi kebijakan publik. Maka dari itu diperlukan adanya dukungan dan lingkungan yang kondusif.

Secara sederhana dapat dikatakan implementasi kebijakan merupakan seluruh Tindakan yang dilakukan dengan pernyataan atau merumuskan kebijakan dan berdampak pada aktualitas. Implementasi kebijakan juga dimaknai sebagai jaminan pemerintah dari kesalahpahaman *stakeholder* terhadap tujuan yang telah dibuat. Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya sebatas proses pelaksanaannya saja tetapi juga meliputi seluruh Tindakan yang dilakukan oleh individual saja atau sifat-sifat pelaksana dan sekelempok pemerintah dan swasta dan serta pelaku administrasi yaitu unit birokrasi yang bertanggung jawab agar terlaksananya kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati tetapi harus dapat melihat kondisi politik, sosial dan ekonomi yang berpengaruh kepada sasaran yang dicapai. Dengan demikian implementasi kebijakan bermaksud

untuk mengetahui apa yang telah terjadi melalui kebijakan yang dirancang dan dampak apa yang terjadi setelah kebijakan itu dibuat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti tertarik untuk mengambil teori dan model tentang implementasi kebijakan publik dari model Van Metter Van Horn (Kadji 2015) sebagai kerangka berfikir dengan variabel sebagai berikut:

- 1) Standar dan sasaran kebijakan
- 2) Sumber daya
- 3) Komunikasi antar organisasi
- 4) Karakteristik agen pelaksana/implementor
- 5) Kecenderungan (disposition) pelaksana/implementor
- 6) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

2.2.3. Penanggulangan Bencana

Bencana dapat didefinisikan dengan banyak arti baik secara normatif maupun menurut para ahli. Bencana menurut UU Nomor 24 Tahun 2007 yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Menurut Departemen Kesehatan RI, Definisi bencana yaitu kejadian atau peristiwa pada suatu daerah yang terdampak kerusakan ekologi dapat merugikan kehidupan manusia serta terganggunya Kesehatan dan pelayanan Kesehatan sehingga membutuhkan bantuan dari *stakeholder* terkait.

Menurut Heru Sri Haryanto yang dikutip oleh (Khambali 2017) berpendapat bahwasannya bencana yaitu terganggunya pola-pola kehidupan normal, sehingga merugikan kehidupan manusia, strata sosial, serta timbulnya kebutuhan masyarakat.

Sedangkan menurut WHO (2002), definisi bencana (disaster) yaitu fenomena yang menimbulkan kehancuran, hambatan ekologis, menelan korban jiwa atau menurunnya kadar kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala

tertentu yang membutuhkan tanggapan dari masyarakat dan wilayah luar yang terdampak.

Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa definisi bencana diatas, bahwasannya definisi bencana secara umum yaitu peristiwa atau fenomena yang menyebabkan kerusakan, kehancuran ekologi sehingga dapat menimbulkan kerugian harta bahkan sampai kehilangan nyawa.

Menurut Khambali (2017) jenis ancaman bencana dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a) Bencana Alam Geologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh gaya endogen (dari bumi)
- b) Bencana Alam Klimatologis adalah bencana yang ditimbulkan dari angin dan hujan. Contohnya yaitu banjir, angin puting beliung, badai, kekeringan, dan banjir bandang.
- c) Bencana Alam Ekstra-terrestrial adalah bencana alam yang diakibatkan dentuman meteor luar angkasa. Bila bencana tersebut terjadi maka akan berdampak dahsyat bagi makhluk hidup di bumi.

Dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwasannya Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a) Prabencana

Menurut Anies (2018) tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi.

- 1) Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana dengan mengorganisir setiap langkah yang tepat dan sesuai. Kesiapsiagaan adalah proses yang paling penting karena sangat berpengaruh terhadap ketahanan suatu daerah dalam menghadapi bencana.

- 2) Peringatan dini

Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu

tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini disampaikan dengan segera mungkin kepada masyarakat yang daerahnya memiliki potensi bencana.

3) Mitigasi

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2008, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana atau sebagai upaya untuk meminimalisir dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

b) Tanggap darurat

Tanggap darurat adalah bentuk upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangguli atau meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari bencana. Bentuk upaya yang dilakukan yaitu penyelamatan korban dan harta benda, evakuasi dan pengungsian, pemenuhan kebutuhan dasar (Suharno dan Darmawan 2018).

c) Pasca bencana

Pasca bencana adalah upaya penanggulangan bencana yang difokuskan kepada rehabilitasi dan rekonstruksi. Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilalui, langkah selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi.

1) Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai ke tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.

2) Rekonstruksi

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah bencana, baik tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum, dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.

2.2.4. Bencana Banjir

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Banjir adalah peristiwa atau keadaan dimana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat.

Menurut Ramli yang dikutip oleh (Rachman 2018). Banjir adalah keadaan suatu daerah yang tergenang oleh air dalam jumlah yang banyak. Sering terjadi banjir dikarenakan meningkatnya debit air pada suatu badan air seperti sungai dan danau, sehingga menyebabkan bendungan dan mengeluarkan air dari batas alaminya sehingga menggenangi daratan.

Menurut buku Pedoman Latihan Kesiapsiagaan Bencana (BNPB 2017), jenis banjir dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu :

- a) Banjir Genangan adalah fenomena air hujan yang turun di sebiah wilayah kemudian menimbulkan genangan air
- b) Banjir Bandang adalah banjir besar yang mengalir deras secara tiba-tiba yang menghanyutkan benda-benda besar disekitarnya.
- c) dan Banjir Rob merupakan peristiwa banjir yang disebabkan oleh pasangny air laut kemudian meluap ke wilayah daratan.

2.2.5. Kawasan Pesisir

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil menyebutkan bahwa wilayah pesisir laut adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut.

Menurut Kay dan Alder dalam (Kristian 2019) menjelaskan bahwasannya wilayah pesisir memiliki keunikan, karena merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan yang dapat dilihat dari perspektif perencanaan dan pengelolaan.

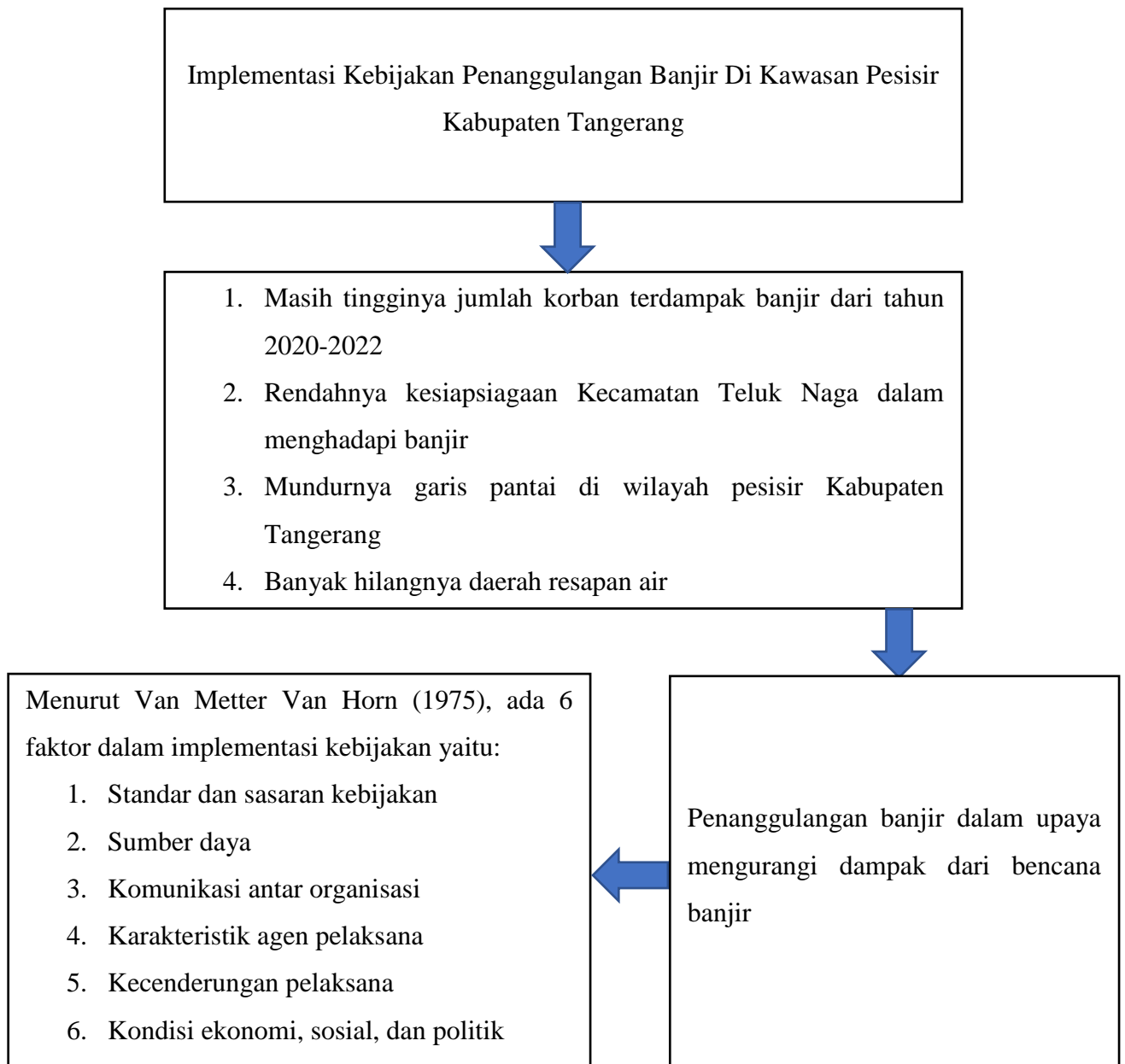
Dahuri et al. (1996) dalam (ASYIAWATI dan AKLIYAH 2017) menjelaskan bahwa wilayah pesisir merupakan suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan, dimana batas wilayah pesisir ke arah darat adalah jarak arbitrer dari rata-rata pasang tertinggi (meanhigh tide) dan batas ke arah laut adalah batas yuridiksi wilayah atau negara.

2.3. Kerangka Berfikir

Model Implementasi kebijakan publik menurut Van Metter Van Horn disebut sebagai “*A Model of the Policy Implementation Process*”. Model ini menggambarkan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yang saling berkaitan.

Pengukuran tersebut dapat menggunakan variabel kebijakan tersebut dapat dilakukan dengan standar dan sasaran kebijakan, dalam hal ini implementor perlu mempunyai landasan atau dasar hukum atau regulasi yang mendorong keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Kemudian perlu adanya sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut agar sesuai dengan landasan atau dasar hukum. Sumber daya, dalam hal ini BPBD Kabupaten Tangerang perlu mempersiapkan dengan baik personil yang dimiliki untuk mengatasi permasalahan bencana banjir. Komunikasi antar organisasi, dalam hal ini, BPBD Kabupaten Tangerang sebagai pemegang komando dalam proses penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Tangerang sudah seharusnya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai *stakeholder* yang ada. Karakteristik agen pelaksana/implementor, dalam hal ini dilihat dari sejauh mana implementor melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Kecenderungan pelaksana/implementor, dalam hal ini dilihat dari sikap BPBD Kabupaten Tangerang dalam mengatasi permasalahan banjir terkait Implementasi Kebijakan Penanggulangan Banjir di Kawasan Pesisir Kabupaten Tangerang. Dan kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang mendorong keberhasilan kebijakan penanggulangan banjir di kawasan pesisir Kabupaten Tangerang.

Gambar 2.6 Kerangka Berfikir



Sumber: Hasil Olahan Peneliti